

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

SINERGI PEMERINTAH DAERAH DENGAN BATALYON INFANTERI 111/KARMA BHAKTI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN ACEH TAMIANG – PROVINSI ACEH

Muh Ibnu Katsier Gafur¹

1) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : ibnukatsier1996@gmail.com

Abstrak

Berbagai jenis regulasi telah ditegakkan oleh pemerintah sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, dibarengi dengan tegaknya berbagai Pemangku Kepentingan sebagai institusi penjabaran dari Undang-undang. Perkembangan tata pemerintahan yang semakin kedepan ternyata juga mengalami pola transisi dari sifat sentralis menuju desentralis sebagaimana konsep otonomi daerah yang ditegakkan dalam rangka memberikan kebebasan kepada tiap daerah untuk mengembangkan sendiri daerahnya, agar pembangunan infrastruktur yang merata dapat tercapai sehingga kesejahteraan secara merata dan keadilan sosial dapat terwujud.

Pemilihan metode dan pendekatan pada penelitian yang dilakukan yaitu adalah menggunakan penelitian kualitatif dimana Penelitian bisa saja dilakukan dalam situasi yang wajar melalui pengamatan terhadap orang dan lingkungan hidupnya. Peneliti turun ke lapangan, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mengadakan pengamatan dan penjelajahan. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan (Rahmat, 2009).

Sebagai salah satu satuan tempur Batalyon Infanteri 111/Karma Bhakti yang berada dibawah Komando Brigif 25/Siwah, yang berkedudukan di Tualang Cut, kecamatan Menyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan satuan tempur raider yang dimana memiliki tugas pokok dan tanggung jawab sebagai satuan tempur yang dapat beropansi dalam unit kecil rahasia, dan mendadak dalam menghancurkan lawannya, selain memiliki tugas tempur Yonif 111/KB juga memiliki peran sebagai satuan non komando wilayah (SATNONKOWIL) yakni memiliki peran terbatas dalam kewilayahan namun tetap dituntut untuk memiliki peran dalam membantu memelihara situasi kondusif di tengah masyarakat.

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Penanganan konflik sosial di Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan melalui strategi yang berbeda oleh dua entitas utama, yaitu Pemerintah Daerah (melalui Kesbangpol) dan Batalyon Infanteri Raider Khusus 111/Karma Bhakti (Yonif 111/KB). Masing-masing pihak memiliki pendekatan dan peran yang berbeda dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah yang rentan terhadap konflik tersebut.

Sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan Yonif 111/KB dalam menangani konflik sosial telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan peningkatan di beberapa aspek. Pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menekankan pencegahan dini dan deteksi potensi konflik dengan melakukan sosialisasi dan edukasi regulasi kepada masyarakat. Pemerintah juga membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang bekerja sama dengan aparat keamanan untuk merespons situasi konflik dengan cepat dan efektif. Di sisi lain, Yonif 111/KB berperan penting dalam menjaga stabilitas wilayah melalui operasi pengamanan dan pembinaan teritorial. Konsep kemanunggalan TNI-Rakyat yang diusung oleh Yonif 111/KB menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah eskalasi konflik.

Kata Kunci: Sinergi, Konflik Sosial, Batalyon Infanteri Raider Khusus 111

Abstract

Various types of regulations have been enforced by the government as an effort to maintain public order and security, accompanied by the establishment of various Stakeholders as institutions that explain the Law. The development of governance that is increasingly forward has also experienced a transition pattern from a centralist to a decentralized nature as the concept of regional autonomy is enforced in order to provide freedom to each region to develop its own region, so that equitable infrastructure development can be achieved so that welfare is evenly distributed and social justice can be realized.

The selection of methods and approaches in the research conducted is to use qualitative research where research can be conducted in a natural situation through observation of people and their living environment. Researchers go to the field, interact with them, try to understand their language and interpretation of the world around them, conduct observations and explorations. Qualitative research tends to use an inductive approach analysis. The process and meaning (subject perspective) are more emphasized in qualitative research. The theoretical basis is used as a guide so that the focus of the research is in accordance with the facts in the field (Rahmat, 2009). As one of the combat units of Infantry Battalion 111/Karma Bhakti which is under the Command of Brigif 25/Siwah, which is based in Tualang Cut, Menyak Payed sub-

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

district, Aceh Tamiang Regency, it is a raider combat unit which has the main task and responsibility as a combat unit that can operate in small secret units, and suddenly in destroying its opponents, in addition to having combat duties, Yonif 111/KB also has a role as a non-regional command unit (SATNONKOWIL), namely having a limited role in the region but still being required to have a role in helping to maintain a conducive situation in the community.

Handling of social conflict in Aceh Tamiang Regency is carried out through different strategies by two main entities, namely the Regional Government (through Kesbangpol) and the Special Raider Infantry Battalion 111/Karma Bhakti (Yonif 111/KB). Each party has a different approach and role in maintaining social stability in areas prone to conflict.

The synergy between the Aceh Tamiang District Government and Yonif 111/KB in handling social conflicts has gone well, although it still needs improvement in several aspects. The government through the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) emphasizes early prevention and detection of potential conflicts by conducting socialization and education of regulations to the community. The government has also formed an Integrated Social Conflict Handling Team that works together with security forces to respond to conflict situations quickly and effectively. On the other hand, Yonif 111/KB plays an important role in maintaining regional stability through security operations and territorial development. The concept of TNI-People unity carried by Yonif 111/KB is an important factor in building public trust and preventing conflict escalation.

Keywords: Synergy, Social Conflict, Special Raider Infantry Battalion 111

PENDAHULUAN

Perdamaian dan keamanan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Eksistensi dari konsep keamanan telah ada dalam ide tentang negara oleh Plato walaupun bentuknya masih sebuah imajinasi. Dalam perkembangannya, negara sebagai sebuah organisasi yang dibentuk sebagai manifestasi sifat manusia sebagai zoon politicon, dan ketidakmampuan setiap individu itu untuk hidup sendiri sehingga membutuhkan orang lain untuk mewujudkan keinginan yang ingin dicapai. Maka negara tidak lain adalah sebuah ‘alat’ yang digunakan untuk mengabdikan kehendak dari tiap individu tersebut.

Berbagai jenis regulasi telah ditegakkan oleh pemerintah sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, dibarengi dengan tegaknya berbagai Pemangku

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

Kepentingan sebagai institusi penjabaran dari Undang-undang. Perkembangan tata pemerintahan yang semakin kedepan ternyata juga mengalami pola transisi dari sifat sentralis menuju desentralis sebagaimana konsep otonomi daerah yang ditegakkan dalam rangka memberikan kebebasan kepada tiap daerah untuk mengembangkan sendiri daerahnya, agar pembangunan infrastruktur yang merata dapat tercapai sehingga kesejahteraan secara merata dan keadilan sosial dapat terwujud.

Dalam kacamata UU Penda, yang dimaksud dengan pertahanan adalah segala hal yang memiliki keterkaitan dengan militer seperti mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara, dan sebagainya.

Melihat penjelasan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat dikotomi mengenai urusan pertahanan dan keamanan yang masing-masing diserahkan kepada militer dan kepolisian. Permasalahan yang timbul saat ini adalah ketidakjelasan aturan yang berakibat pada tumpang tindih kewenangan antara pemangku kepentingan dalam menangani konflik yang berada di daerah. Hal ini diperparah dengan tidak adanya yang memperhatikan keberadaan Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial atau yang kemudian disingkat dengan UUPKS.

Salah satu wilayah Indonesia yang rentan terjadinya konflik sosial adalah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah yang menjadi pintu masuknya menuju provinsi Aceh dari daerah Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang mengalami pemekaran kecamatan sehingga wilayah administrasi menjadi 12 Kecamatan dan 213 kampung. Batas-batas Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa, sebelah Timur dengan Propinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Gayo Lues dan sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tenggara. Kabupaten Aceh

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Tamiang Terkenal Akan Sumber daya hasil bumi berupa minyak dan gas bumi yang saat ini dikelola oleh Pertamina serta hampir seluruh wilayah Tamiang merupakan lahan perkebunan milik perusahaan serta lahan perkebunan rakyat dan segala potensi Pariwisata yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.

Akan tetapi dibalik sumber kekayaan alam dan segala potensi pariwisata yang ada ini terdapat potensi-potensi kerawanan terjadinya konflik sosial. Hal ini dikarenakan Kabupaten Aceh Tamiang merupakan wilayah pintu masuk menuju provinsi Aceh, dimana Kabupaten Aceh Tamiang tersebut di domisili oleh banyak etnis dan suku bangsa, baik dari suku Jawa, Batak, Minang, Tionghoa dan lain-lain. Diluar suku asli yaitu Suku Tamiang, Suku Aceh dan Suku Gayo. Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang rawan akan terjadinya konflik sosial, konflik SARA dan konflik lainnya, sebagai akibat dari berbagai aktifitas seperti politik, pemerintahan, dan demokrasi, baik berupa pilpres, pilkada, dan pileg. Atau pun dalam berbagai aktifitas sosial (www.AcehTamiang.co.id)

Sebagai salah satu wilayah bekas Konflik Aceh yang terkenal salah satu contoh kejadian yang pernah terjadi di tahun 2023 yang lalu adalah kegiatan pengibaran bendera merah bulan bintang, yang dimana merupakan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang dilakukan oleh oknum masyarakat di sebuah Cafe di daerah Aceh Tamiang. Hal ini dapat memicu akan terjadi kembali potensi konflik baik dimulai dari konflik sosial sampai dengan konflik senjata yang dapat memberikan dampak buruk kepada kelangsungan kehidupan masyarakat Aceh.

Sebagai salah satu satuan tempur Batalyon Infanteri 111/Karma Bhakti yang berada dibawah Komando Brigif 25/Siwah, yang berkedudukan di Tualang Cut, kecamatan Menyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan satuan tempur raider yang dimana memiliki tugas pokok dan tanggung jawab sebagai satuan tempur yang dapat beropansi dalam unit kecil rahasia, dan mendadak dalam menghancurkan lawannya, selain memiliki tugas tempur Yonif 111/KB juga memiliki peran sebagai satuan non komando wilayah (SATNONKOWIL) yakni memiliki peran terbatas dalam kewilayahan namun tetap dituntut untuk memiliki peran dalam membantu memelihara situasi kondusif di tengah masyarakat. Dalam perspektif TNI AD membantu upaya

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

dalam menciptakan masyarakat yang kondusif terdapat pada doktrin TNI pada 8 Wajib TNI . Sehingga dalam menjaga situasi dan keadaan yang kondusif dan stabilitas keamanan, yonif 111/KB selalu mempedomani 8 Wajib TNI hal ini juga didukung dengan memegang teguh pada UU No 3 Tahun 2002, Tentang pertahanan Negara yang menyatakan Bahwa TNI sebagai komponen utama/alat pertahanan negara menghadapi ancaman militer dan non militer baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Pemilihan metode dan pendekatan pada penelitian yang dilakukan yaitu adalah menggunakan penelitian kualitatif dimana Penelitian bisa saja dilakukan dalam situasi yang wajar melalui pengamatan terhadap orang dan lingkungan hidupnya. Peneliti turun ke lapangan, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mengadakan pengamatan dan penjelajahan. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan (Rahmat, 2009).

Tetapi pada Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan prekriptif dengan menguraikan berbagai data dan informasi berkaitan dengan tema penelitian baik yang bersumber dari narasumber maupun literatur berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori dan doktrin yang relevan, hasil penelitian maupun artikel jurnal yang relevan dan sebagainya (Wahidmurni 2017). Pendekatan prekriptif digunakan untuk memandu proses penggalan data dan informasi serta analisis yang dapat mengarahkan pada rumusan rekomendasi sebagai solusi atas permasalahan yang dikaji sehubungan dengan Sinergitas

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

prajurit Yonif 111/KB dengan Pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial di kabupaten aceh tamiang.

KERANGKA PEMIKIRAN.

Kerangka Pemikiran dalam Penelitian adalah Sinergitas Yang menjadi kerangka utama, yang digunakan oleh prajurit Batalyon infanteri 111/KB dengan pemerintah daerah. Sehingga menghasilkan suatu proses kerja sama yang baik dalam mengatasi konflik sosial yang terjadi di kabupaten aceh tamiang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari kegiatan sinergitas antara prajurit Batalyon Infanteri 111/KB ini dengan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik sosial inilah menghasilkan suatu rumusan masalah yang harus diteliti oleh peneliti yaitu proses terjadinya Sinergitas diantar Prajurit Batalyon infanteri 111/KB dengan pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial. Sinergitas kedua Instansi sangat dibutuhkan dalam kerja sama untuk mengatasi konflik sosial yang terjadi sehingga akan menghasilkan manfaat dapat meningkatnya sinergitas dan kerja sama serta saling mengenal dalam penyelesaian ataupun penanganan masalah baik dari segi keamanan maupun ketertiban yang ada di masyarakat.

Selama proses Sinergi berlangsung menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, serta diskusi dengan kelompok masyarakat, kemudian data sekunder diperoleh melalui studi Pustaka atau pun literatur.

1. Pengertian Sinergi

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sinergi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau tindakan bersama. Sinergi sedang dibangun dan dipastikan kemitraan yang bermanfaat dan kemitraan yang dapat menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan agar dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas (<http://kbbi.web.id/Sinergi/>). Sehingga dalam bersinergi dapat menumbuhkan rasa solidaritas antar sesama. Jika sinergi atau sinergitas tersebut

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

diterapkan dalam perusahaan kepada karyawan sehingga bagaimanapun juga karyawan tersebut dapat melakukan sinergi nya bersama dengan karyawan lain, maka sinergi atau sinergitas adalah faktor utama dalam perusahaan. Namun di dalam suatu perusahaan tidak adanya sinergi atau sinergitas dalam perusahaan, maka akan menimbulkan pertikaian antar karyawan yang dapat mengakibatkan sebuah tatanan kerja yang kurang efektif. Jika perusahaan tersebut adanya sinergi antar karyawan akan menjadikan produktivitas perusahaan akan maksimal dan akan mencapai sebuah target yang sesuai dengan perusahaan.

Sinergi antar antar instansi adalah hal penting untuk mencapai target yang diinginkan pada setiap tujuan kerja sama. Tidak terdapat perbedaan dengan ilmu administrasi publik yang dianggap sebagai kerjasama yang dilakukan antar dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Berdasarkan sinergitas yang memosisikan diri sebagai bagian dari katalisator yang terdapat di ilmu administrasi dengan tujuan untuk mencapai hasil yang maksimal. Sinergi bisa dibangun dari cara berkomunikasi serta koordinasi.

a) Komunikasi

Komunikasi ialah sebuah tindakan penjelasan informasi antar pihak ke pihak lainnya . Komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang yang dilakukan untuk menginterpretasikan sebuah pandangan baru. Sedangkan menurut Sofyandi serta Garniwa komunikasi bisa dijabarkan menjadi dua bagian, yaitu :

- Komunikasi berorientasi yang dilakukan terhadap seseorang yang akan melaksanakan kegiatannya.
- Komunikasi berorientasi pada penerima yang menangani semua aktivitas dalam kerangka komunikasi yang melibatkan antar perorangan

b) Koordinasi

Adanya sinergi dari seorang pegawai pastilah terdapat adanya koordinasi antar pegawai. Komunikasi hanya dapat dikoordinasikan antar pegawai yang dinyatakan oleh Hasan bahwa pada komunikasi diharapkan koordinasi⁷ . Koordinasi dapat diartikan

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

sebagai sebuah integrasi dari aktivitas individu maupun kelompok menuju ke arah tujuan bersama. terdapat 5 syarat agar terwujudnya yang kompak yaitu :

- Hubungan langsung, bahwasanya hubungan langsung dari koordinasi yang dilakukan antar pegawai.
- Kesempatan awal, sebelum ke tahap perencanaan pastilah diperlukan dengan adanya kesempatan awal untuk saling koordinasi.
- Kontinuitas, proses yang dilakukan secara di setiap waktu pada saat tahap perencanaan
- Dinamisme, koordinasi dapat dilakukan secara terus-menerus yang dapat dijadikan sebagai perubahan dari lingkungan intern maupun ekstern
- Tujuan yang jelas, tujuan jelas merupakan bagian penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif

c) Tujuan Sinergi

Tujuan dari sinergi adalah untuk mempengaruhi perilaku individu berkomunikasi dengan grup, melalui dialog dengan semua orang kelompok, pandangan, sikap, dan pendapat mereka mengenai kesuksesan¹. Sinergi juga saling melengkapi dan dilengkapi untuk mendapatkan sebuah tercapainya tujuan per bagian. Konsep kerja sama tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Berorientasi pada hal yang positif
- 2) Sebagai alternatif dari paradigma pelengkap
- 3) Saling bekerja sama untuk mencapai tujuan.
- 4) Mendapatkan hasil yang maksimal.

Melalui sinergi, terdapat kolaborasi dari paradigma (pola pikir) yang berbeda akan menghasilkan sebuah hasil yang lebih besar dan lebih efektif, sebab proses yang dilakukan menunjukkan tujuan dan kesepakatan bersama pada hasil positif.

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Bersinergi berarti saling menghargai perbedaan ide dan pendapat serta bersedia saling berbagi. Bersinergi tidak egois, tetapi saling mendukung di antara lain nya¹¹. Sinergi bertujuan untuk menggabungkan bagian-bagian yang berbeda menjadi satu tujuan Bersama.

2. Indikator Sinergi

Indikator yang digunakan untuk menganalisis sinergi dalam penelitian ini adalah Doctoroff, menyatakan bahwa syarat utama dari sistem sinergi yang ideal, termasuk indikator-indikator seperti komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas.

a) Komunikasi Yang Efektif

Komunikasi efektif bisa membentuk perubahan perilaku seseorang yang terlihat pada saat proses penyampaian. Tujuan komunikasi efektif sebenarnya untuk memudahkan informasi dari penyampaian secara lengkap antara pemberi informasi serta penerima informasi dengan bahasa yang jelas agar mudah di pahami. Komunikasi yang lebih efektif terjadi ketika komunikator berbagi kesamaan dalam hal pemahaman, perilaku serta bahasa. Komunikasi dikatakan efektif jika dilakukan sebagai berikut:

- Pesan dapat diterima dan dipahami sebagaimana yang dimaksud dari penyampaian.
- Informasi disampaikan oleh pengirim dapat diketahui oleh penerima, oleh sebab itu dari hal penyampaiannya dapat mudah di pahami.
- Tidak adanya halangan ketika saat komunikasi terdapat sebuah pertanyaan dari penerima.

b) Umpan balik yang cepat (*Feedback*).

Dalam komunikasi pasti adanya sebuah respon dari penerima informasi terkait elemen dalam penyampaian dari pendengar terhadap yang disampaikan pengirim dengan penyampaian yang jelas. Di antaranya dalam prinsip umpan balik dari komunikasi yang disampaikan sebagai berikut :

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

- Kejelasan, dalam kejelasan ini pada prinsip umpan balik pastilah sebagai faktor penting dalam hal penyampaian. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari informasi yang disampaikan .
 - Ketepatan, pada ketepatan inilah sebagai tonggak penting dalam melakukan penyampaian. Sehingga, cepat tanggap dalam komunikasi akan menghasilkan sebuah pemahaman yang jelas dari penerima informasi.
 - Validitas, dalam melakukan komunikasi bisnis tentunya harus valid supaya efektif agar mendapatkan sebuah respon yang baik dari penerima informasi.
- c) Kepercayaan.

Kepercayaan dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan untuk meyakinkan seseorang terhadap sesuatu hal. Salah satunya untuk membentuk kepercayaan dalam suatu instansi berarti tahapan untuk meyakinkan pada hal yang positif, membangun dari setiap langkah, serta komitmen. Jika kepercayaan disalah artikan maka tidak akan menghasilkan sebuah kepercayaan dari seseorang.

d) Kreatifitas

Kreativitas ialah naluri dari seseorang yang terus dikembangkan sehingga akan menimbulkan sebuah ide baru serta menemukan inovasi baru yang akan terus digali. Menurut Munandar menyampaikan bahwa terkait definisi dari kreativitas yakni sebuah kemampuan seseorang berdasarkan pola pikir yang dilakukan untuk memecahkan sebuah permasalahan sehingga dapat menemukan inovasi baru. Dari penjelasan tersebut dijabarkan bahwa kreativitas ialah sebuah perilaku dari karakteristik seseorang yang dilakukan untuk melakukan suatu tindakan berupa inovasi baru dari hal yang di dapatkan.

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

PEMBAHASAN**Potensi Konflik Sosial di Kabupaten Aceh Tamiang**

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki potensi konflik sosial yang signifikan, terutama dalam konteks keberagaman sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai pintu masuk ke Provinsi Aceh dari Sumatera Utara, wilayah ini berada di persimpangan strategis dengan keberagaman etnis dan suku yang kompleks. Suku Jawa, Batak, Minang, Tionghoa, serta suku asli seperti Suku Tamiang, Aceh, dan Gayo, hidup berdampingan di wilayah ini. Keberagaman ini memberikan dinamika sosial yang kaya, namun juga menimbulkan potensi ketegangan sosial, terutama dalam situasi politik atau permasalahan tanah. Pengelolaan keragaman ini memerlukan pendekatan yang sensitif agar potensi konflik yang muncul dari perbedaan budaya, agama, dan etnis dapat diminimalisir.

Salah satu isu utama yang memicu konflik di Aceh Tamiang adalah masalah agraria, terutama konflik lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan kelapa sawit. Pada tahun 2021, konflik agraria meningkat tajam karena perusahaan kelapa sawit memperluas lahan tanpa persetujuan masyarakat setempat. Masyarakat merasa hak mereka atas tanah yang telah lama digarap diabaikan, sementara perusahaan lebih difasilitasi oleh pemerintah. Ketidakadilan ini menciptakan ketegangan yang cukup signifikan dan memicu perlawanan masyarakat terhadap perusahaan. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana isu agraria dapat menjadi pemicu utama konflik di wilayah yang kaya sumber daya alam seperti Aceh Tamiang.

Ketegangan politik juga menjadi faktor signifikan dalam potensi konflik sosial di Aceh Tamiang. Pemilihan umum, baik Pilkada, Pilpres, maupun Pileg, sering kali memicu ketegangan antara berbagai kelompok pendukung partai politik. Pada tahun 2021, ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan dan dugaan ketidakadilan dalam proses kampanye menyebabkan bentrokan antara pendukung calon-calon politik. Polarisasi politik yang tajam serta kampanye negatif yang dilakukan melalui media sosial memperburuk situasi dan menciptakan iklim politik yang tidak

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

stabil. Kondisi ini semakin memperburuk potensi konflik sosial, terutama di wilayah yang memiliki sejarah panjang terkait konflik politik.

Sinergi Strategi Penanganan Konflik Antara Pemerintah Dan Batalyon Infanteri 111/ KB di Kabupaten Aceh Tamiang

Penanganan konflik sosial di Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan melalui strategi yang berbeda oleh dua entitas utama, yaitu Pemerintah Daerah (melalui Kesbangpol) dan Batalyon Infanteri Raider Khusus 111/Karma Bhakti (Yonif 111/KB). Masing-masing pihak memiliki pendekatan dan peran yang berbeda dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah yang rentan terhadap konflik tersebut. Berikut adalah perbandingan strategi yang digunakan oleh pemerintah dan Yonif 111/KB dalam menangani konflik sosial:

1) Fokus Utama dalam Pencegahan Konflik

- a. Pemerintah Aceh Tamiang menekankan pada pencegahan dini dan deteksi potensi konflik melalui kegiatan sosialisasi regulasi dan edukasi. Melalui Kesbangpol, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap ancaman konflik. Menurut Pj Bupati DR. H. Asra, "Pemerintah berusaha meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi konflik melalui sosialisasi regulasi dan pembentukan tim terpadu." Kegiatan ini ditujukan kepada tokoh masyarakat, pemuda, dan instansi terkait untuk membangun kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas dan ketertiban sosial.
- b. Di sisi lain, Yonif 111/KB lebih berfokus pada pembinaan teritorial. Letkol Andi Arianto S.I.P menjelaskan, "Pendekatan pembinaan teritorial bertujuan membangun hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat melalui kegiatan sosial yang bersifat persuasif." Dengan interaksi langsung, batalyon berupaya mengurangi potensi eskalasi konflik di wilayah rawan.

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Pencegahan konflik di Aceh Tamiang merupakan langkah awal yang diambil baik oleh pemerintah maupun TNI untuk memastikan potensi konflik tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Pemerintah fokus pada sosialisasi regulasi dan peningkatan kewaspadaan dini melalui edukasi, sementara TNI menggunakan pendekatan teritorial untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Kedua strategi ini berusaha untuk mengatasi akar masalah sebelum konflik terjadi.

2) Respon terhadap Situasi Konflik

- a. Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang bertugas merespons konflik dengan cepat dan efektif. Tim ini berfokus pada penyelesaian konflik melalui dialog dan mediasi. DR. H. Asra menyebutkan, "Tim terpadu bekerja dengan cepat untuk merespons situasi konflik melalui mediasi, dengan tujuan agar konflik bisa diselesaikan sebelum berkembang."
- b. Yonif 111/KB, dalam menghadapi situasi konflik, fokus pada operasi pengamanan yang berkelanjutan. "Peran TNI adalah menjaga keamanan dan memastikan situasi kondusif, terutama pada saat-saat rawan seperti pemilu," kata Letkol Andi Arianto S.I.P. Batalyon ini sering kali dilibatkan dalam menjaga ketertiban dan memastikan netralitas dalam proses politik.

Dalam menghadapi konflik yang sudah muncul, respon cepat dan terorganisir menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah melalui Tim Terpadu mengedepankan dialog dan musyawarah sebagai solusi utama untuk menyelesaikan konflik secara damai, sedangkan Yonif 111/KB berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, terutama pada saat-saat genting seperti pemilu atau bentrokan sosial. Keduanya berkolaborasi untuk mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan.

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

3) Pendekatan Reintegrasi Sosial dengan Kemanunggalan TNI-Rakyat

- a. Pemerintah Aceh Tamiang menggunakan pendekatan reintegrasi sosial untuk membangun kembali kepercayaan di antara masyarakat yang terpecah akibat konflik. Melalui musyawarah dan dialog, pemerintah berupaya untuk menciptakan harmoni. Menurut Teuku Fakhrrurad, "Pemerintah sering kali mengadakan dialog dengan masyarakat sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah."
- b. Yonif 111/KB menekankan konsep kemanunggalan TNI-Rakyat, yang berfokus pada pembangunan kedekatan emosional dan rasa aman di masyarakat. Letkol Andi Arianto S.I.P menjelaskan, "Pendekatan kemanunggalan antara TNI dan rakyat bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan di masyarakat."

Pemerintah Aceh Tamiang berusaha memperkuat kohesi sosial dengan pendekatan reintegrasi, membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui musyawarah. Di sisi lain, Yonif 111/KB menggunakan kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, menciptakan suasana yang aman dan harmonis. Kedua pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

4) Perhatian pada Kesejahteraan Masyarakat

- a. Pemerintah Daerah mengutamakan edukasi sebagai bagian dari peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga stabilitas sosial. DR. H. Asra menambahkan, "Sosialisasi tidak hanya berfokus pada regulasi penanganan konflik, tetapi juga pada cara mencegah dan menghadapi potensi konflik di lingkungan masyarakat."
- b. Yonif 111/KB juga mengedepankan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. "Program-program kemanusiaan yang kami lakukan membantu masyarakat merasa terlindungi dan terbantu,"

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

jas Letkol Andi Arianto S.I.P, menekankan pentingnya kesejahteraan untuk menjaga stabilitas sosial.

Kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama dalam upaya pencegahan konflik. Pemerintah memberikan edukasi tentang stabilitas sosial dan pentingnya menjaga ketertiban di lingkungan mereka. Yonif 111/KB turut berkontribusi melalui program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya membantu menciptakan rasa aman dan terlindungi di kalangan warga. Upaya ini menunjukkan bahwa kesejahteraan adalah elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial.

5) Profesionalisme dalam Penanganan Konflik

- a. Pemerintah lebih menekankan penguatan regulasi dan edukasi hukum, seperti yang diungkapkan oleh DR. H. Asra, "Pemerintah terus melakukan sosialisasi UU No. 7 Tahun 2012 untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat." Fokus ini diharapkan dapat mencegah konflik sejak dini melalui pemahaman regulasi.
- b. Yonif 111/KB menekankan profesionalisme prajurit dalam penanganan konflik. Letkol Andi Arianto S.I.P menyatakan, "Semua prajurit dilatih untuk menghadapi situasi konflik dengan profesionalisme tinggi, menghindari penggunaan kekerasan berlebihan dan memastikan respons yang terukur."

Profesionalisme adalah fondasi utama dalam penanganan konflik yang dilakukan oleh pemerintah maupun TNI. Pemerintah menekankan pentingnya edukasi hukum dan penegakan regulasi sebagai pencegahan konflik sosial. Sementara itu, Yonif 111/KB memastikan prajuritnya terlatih untuk menangani konflik dengan profesionalisme tinggi, menjaga ketertiban tanpa menambah eskalasi, dan tetap mematuhi aturan yang ada. Kedua pihak bekerja sama untuk menjamin bahwa konflik dapat diatasi dengan cara yang tepat dan terukur.

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Pemerintah dan Yonif 111/KB memiliki pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam penanganan konflik sosial di Aceh Tamiang. Pemerintah lebih berfokus pada aspek regulasi, edukasi, dan pendekatan damai melalui dialog dan reintegrasi sosial. Sementara itu, Yonif 111/KB lebih menekankan pada pendekatan teritorial, profesionalisme prajurit, dan kemanunggalan dengan masyarakat untuk menjaga stabilitas. Kedua pendekatan ini berkontribusi dalam upaya menjaga ketertiban dan mencegah eskalasi konflik di wilayah yang rawan seperti Aceh Tamiang.

Kendala dan Solusi Dalam Proses Penanganan Konflik Sosial pada Batalyon Infanteri 111/KB di Kabupaten Aceh Tiamang

Permasalahan dalam Proses Penanganan Konflik Sosial oleh Yonif 111/KB:

a. Kurangnya Pemahaman Sosiokultural Lokal

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh prajurit Yonif 111/KB adalah kurangnya pemahaman terhadap dinamika sosiokultural lokal. Letkol Andi Arianto S.I.P menegaskan, "Kurangnya pemahaman sosiokultural lokal sering kali mengakibatkan kesalahpahaman dalam interaksi dengan warga, yang bisa memicu ketegangan." Kompleksitas budaya Aceh yang dipengaruhi oleh sejarah panjang konflik politik dan agama perlu dipahami secara mendalam agar tidak terjadi gesekan yang tidak perlu.

b. Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Optimal

Koordinasi yang belum optimal antara TNI, pemerintah daerah, dan aparat sipil sering kali menjadi kendala dalam menangani konflik sosial secara cepat dan efektif. "Kadang TNI dan pemerintah daerah terlihat belum sepenuhnya selaras dalam menangani konflik," kata Teuku Fakhrrurad. Hal ini dapat menyebabkan penanganan konflik menjadi lambat, karena komunikasi yang terputus antara instansi yang seharusnya berkolaborasi.

c. Keterbatasan Sumber Daya

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

Yonif 111/KB juga menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun logistik. Letkol Andi Arianto S.I.P menjelaskan, "Dengan tugas yang beragam, alokasi sumber daya terkadang tidak memadai." Ini menjadi tantangan besar karena Yonif 111/KB harus membagi perhatian antara menjaga keamanan, melakukan operasi kemanusiaan, serta pembinaan teritorial, sehingga penanganan konflik sosial tidak selalu dapat dilakukan secara optimal.

d. Kebutuhan untuk Menjaga Netralitas dalam Konflik Politik

Dalam situasi politik seperti pemilu atau pilkada, tantangan utama Yonif 111/KB adalah menjaga netralitas. "TNI sering kali dikerahkan untuk memastikan situasi tetap kondusif, terutama ketika potensi konflik meningkat," ujar Letkol Andi Arianto S.I.P. Setiap tindakan yang terlihat berpihak pada salah satu pihak politik dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat, sehingga menjaga profesionalisme dan netralitas menjadi sangat penting dalam situasi ini.

e. Respon yang Lambat pada Situasi Konflik Eskalatif

Dalam beberapa kasus, konflik sosial dapat meningkat dengan cepat, sementara Yonif 111/KB menghadapi tantangan dalam merespons situasi tersebut secara cepat. "Respons terhadap konflik terkadang terlambat karena koordinasi antar lembaga belum berjalan optimal," jelas Letkol Andi Arianto S.I.P. Situasi ini menunjukkan bahwa jika tidak ada tindakan yang cepat dan tepat, konflik kecil dapat dengan mudah menjadi lebih besar dan sulit dikendalikan.

KESIMPULAN

- Kabupaten Aceh Tamiang memiliki potensi konflik sosial yang signifikan yang didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu konflik agraria, ketegangan politik, dan sengketa perbatasan. Konflik agraria terutama disebabkan oleh perebutan lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan, terutama perusahaan kelapa sawit yang sering kali

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

memperluas area tanpa persetujuan warga setempat. Ketegangan politik sering kali meningkat menjelang pemilu, baik pada skala lokal maupun nasional, dengan polarisasi pendukung calon yang tajam. Sengketa perbatasan antara Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat di Sumatera Utara juga berkontribusi terhadap ketidakstabilan sosial, di mana klaim tumpang tindih atas lahan perbatasan terus menjadi sumber ketegangan antarwarga.

- Sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan Yonif 111/KB dalam menangani konflik sosial telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan peningkatan di beberapa aspek. Pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menekankan pencegahan dini dan deteksi potensi konflik dengan melakukan sosialisasi dan edukasi regulasi kepada masyarakat. Pemerintah juga membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang bekerja sama dengan aparat keamanan untuk merespons situasi konflik dengan cepat dan efektif. Di sisi lain, Yonif 111/KB berperan penting dalam menjaga stabilitas wilayah melalui operasi pengamanan dan pembinaan teritorial. Konsep kemanunggalan TNI-Rakyat yang diusung oleh Yonif 111/KB menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah eskalasi konflik.
- Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Yonif 111/KB adalah kurangnya pemahaman sosiokultural lokal, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, dan tantangan dalam menjaga netralitas di tengah konflik politik. Kurangnya pemahaman terhadap kompleksitas budaya dan dinamika sosial di Aceh dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam interaksi dengan masyarakat. Selain itu, komunikasi yang belum terjalin dengan baik antara pemerintah, TNI, dan aparat sipil sering kali menghambat respons cepat terhadap konflik. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Yonif 111/KB juga menjadi hambatan, terutama ketika mereka harus menangani berbagai tugas secara

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

bersamaan. Tantangan menjaga netralitas di tengah persaingan politik juga merupakan isu sensitif yang memerlukan perhatian khusus.

- Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut meliputi peningkatan pelatihan sosiokultural bagi prajurit Yonif 111/KB agar lebih memahami budaya dan dinamika sosial lokal. Selain itu, peningkatan koordinasi antar lembaga dilakukan melalui pertemuan rutin dan penunjukan titik kontak yang jelas untuk memperbaiki komunikasi dan kerja sama antara pemerintah, TNI, dan aparat terkait. Optimalisasi sumber daya dilakukan dengan manajemen yang lebih efisien dan kolaborasi dengan instansi lain untuk mengatasi keterbatasan logistik dan personel. Untuk menjaga netralitas dalam konflik politik, Yonif 111/KB menerapkan pengawasan ketat terhadap prajurit yang bertugas, memastikan mereka tetap profesional dan netral dalam situasi politik yang sensitif.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dalam penanganan konflik sosial di Kabupaten Aceh Tamiang, sinergi antara Pemerintah Daerah dan Yonif 111/KB sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya peningkatan di bidang pemahaman sosiokultural, koordinasi antar lembaga, serta profesionalisme prajurit dalam menjaga netralitas, diharapkan potensi konflik dapat diredam dan situasi keamanan di wilayah tersebut tetap stabil.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Minta dukungan pemangku kepentingan, Bagja ungkapkan potensi konflik pemilu 2024. Bawaslu. <https://bawaslu.go.id/id/berita/minta-dukungan-pemangku-kepentingan-bagja-ungkapkan-potensi-konflik-pemilu-2024>

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Minta dukungan pemangku kepentingan, Bagja ungkapkan potensi konflik pemilu 2024. Bawaslu.

Received : 14 Jan 2025

Accepted : 14 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

<https://bawaslu.go.id/id/berita/minta-dukungan-pemangku-kepentingan-bagja-ungkapkan-potensi-konflik-pemilu-2024>

Mongabay Indonesia. (2023). Tenggara, permukiman masyarakat yang kini dikelilingi kebun sawit. Mongabay Indonesia. <https://www.mongabay.co.id/2022/09/28/tenggara-permukiman-masyarakat-yang-kini-dikelilingi-kebun-sawit/>

Tirto.id. (2022). Konflik lahan sawit di Aceh: Buah kegagalan ambisi pasca-Helsinki. Tirto.id. <https://tirto.id/konflik-lahan-sawit-di-aceh-buah-kegagalan-ambisi-pasca-helsinki-cFQw>

Tirto.id. (2022). Penanganan aksi kerusuhan Pilkada Aceh. Tirto.id. <https://tirto.id/penanganan-aksi-kerusuhan-pilkada-aceh-b48A>

Mongabay Indonesia. (2021, September 28). Tenggara, permukiman masyarakat yang kini dikelilingi kebun sawit. Mongabay Indonesia. <https://www.mongabay.co.id/2022/09/28/tenggara-permukiman-masyarakat-yang-kini-dikelilingi-kebun-sawit/>

Antara News. (2021). Kelompok tani di Aceh Tamiang menang gugatan sengketa lahan tingkat MA. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/4275235/kelompok-tani-di-aceh-tamiang-menang-gugatan-sengketa-lahan-tingkat-ma>